

BAB IV

DAMPAK DARI PERJUANGAN MAHASISWA INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA

A. Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI)

Gerakan PKI yang dilancarkan pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 yang dipimpin oleh Jenderal Kolonel Untung menamakan G-30-S PKI. Gerakan tersebut diberi sebutan akronim (pendekatan dari kata atau gabungan kata)¹ atau gestapu (gerakan September 30) adalah istilah Orde Baru, sedangkan Soekarno sendiri menyebutnya gerakan 1 Oktober (Gestok).² Gerakan tersebut untuk sementara berhasil membingungkan masyarakat karena terjadi begitu cepat. Panglima Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto setelah menerima laporan mengenai terjadinya penculikan dengan pembunuhan-pembunuhan, bertindak cepat untuk menguasai keadaan. Hal itu sesuai dengan tata cara yang berlaku bahwa apabila Menteri atau Panglima Angkatan Darat berhalangan, maka Pangkostrad harus mewakilinya. Selama menunggu panggilan dari Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI, untuk sementara Pimpinan Angkatan

¹ <http://www.Indonesia.com> (diakses pada tanggal 06 November 2015).

² Onghokham, *Sukarno Orang Kiri Revolusi dan G30S 1965* (Jakarta; Komunitas Bambu. 2013). p. 153

Darat di bawah pimpinan Soeharto. Soeharto mengambil langkah-langkah mengadakan kordinasi diantara kesatuan-kesatuan ABRI, khususnya daerah Jakarta, melalui Panglima masing-masing, kecuali Menteri atau Panglima Angkatan Udara yang mengeluarkan perintah harian mengundang G-30-S.³

Pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah berhasil menguasai kota Jakarta, Soeharto menemui presiden di istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut presiden memutuskan secara langgung memegang tampuk pimpinan Angkatan Darat, yang semenjak tanggal 1 Oktober 1965 pimpinan Angkatan Darat yang dipegang oleh Soeharto. Sebagai pelaksan harian, presiden Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro untuk menyelenggarakan pemulihan keaman dan ketertiban seperti sedia kala ditujuk Soeharto sebagai Panglima Kostrad.⁴

Kata pertama yang mengingatkan rakyat Indonesia dan dunia luar terkait Gerakan 30 September, berasal dari siaran radio Jakarta pada 1 Oktober tahun 1965 pukul 07:15 pagi. Pengumuman ini menyatakan peristiwa tersebut sebagai hasil dari “Gerakan Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari Angkatan bersenjata”. Dalam peristiwa gerakan G-30-S PKI, komandan Batalion pengawal Soekarno yaitu Resimen Tjakrabirawa telah menangkap sejumlah Jendral yang membentuk sebuah

³ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta : Balai Puataka 2008), p.485.

⁴ *30 tahun Indonesia merdeka 1965-1973* (Jakarta: 1972), p.51.

kelompok yang disebut “Dewan Jendral”. Tindakan tersebut membuahkan hasil yaitu dengan berhasilnya menguasai sejumlah sarana penting di ibukota dan sudah menempatkan pimpinan Nasional lain dibawah perlindungannya. Aksi ini diambil menurut pengumuman radio tersebut, untuk mencegah rencana kudeta oleh Dewan Jendral Soeharto yang disponsori oleh CIA dijadwalkan akan menglengserkan Soekarno pada hari Peringatan Angkatan Bersenjata pada tanggal 5 Oktober tahun 1965.⁵

Untuk menentramkan kegelisahan masyarakat dan menginsafkan pasukan-pasukan yang terlibat dalam pemberotakan PKI, melalui Radio Republik Indonesia (RRI) pada pukul 20.00 *wib*, Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat, mengumumkan tentang adanya usaha pemberotakan oleh yang menamakan diri sebagai G-30S PKI dan diumumkan juga tentang penculikan enam perwira tertinggi Angkatan Darat. Presiden Soekarno dan Menko Hankam atau Kasab dalam keadaan yang aman dan sehat, menyatanyakan bahwa di antara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Kepolisian telah terdapat saling pengertian untuk bekerja sama serta terdapat kebulatan tekad untuk menumpas G-30-S PKI serta kepada rakyat dianjurkan supaya tetap tenang dan waspada.⁶

⁵ Peter Kasenda, *Hari-hari Terakhir Soekarno*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2013), pp.1-2

⁶ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI...*, pp.486-487.

Setelah diketahui bahwa basis utama G-30-S berada di sekitar Lanud Halim Perdana Kusuma dan Presiden Soekarno sedang berada di Lanud Halim. Langkah berikutnya adalah membersihkan daerah sekitar Pangkalan Udara Halim.⁷ Pukul 01:00 tanggal 2 Oktober 1965 setelah bermusyawarah dengan perwira tinggi yang ada di Kostrad antara lain Jenderal A.H. Nasution, Brigjen Sobirin Moechtar, Brigjen Soegandi dan Maeyjen Soeharto sendiri yang mengambil alih Angkatan Darat, memerintahkan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo menguasai Pangkalan Udara Halim. Menjelang pukul 10:00 Kolonel Sarwo Edhi sebagai Komandan RPKAD memasuki wilayah Halim lewat Klender ke Pondok Gede, bermaksud menemui Soekarno. akan tetapi, jalur Pondok Gede Halim oleh PRKAD belum diamankan maka Mayor C.I. Santosa memerintahkan Kompi Kajat dan Kompi-B Yunkav-1/Panser kostrad RPKAD untuk melakukan pengawalan.⁸

Setelah Presiden Soekarno meninggalkan Halim menuju Istana Bogor, diperintahkan bahwa supaya pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Batalion 328 Kujang atau Siliwangi serta Batalioan I Kavalerasi bergerak menuju sasaran. Sementara itu, bantuan kekuatan sebanyak tiga kompi kavaleri dari Bandung dipimpin langsung oleh

⁷ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI ...*, p.487.

⁸ Ambarwulan dan Minuddin Kasdi, "PKI di Balik Gerakan 30 September 1965," dalam Taufik Abdullah dan Sukri Abdurrachman,(eds.), *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012). pp.220-223.

Komandan Kesenjataan Kavalera (Dansenkav) Kolonel Subiantoro setiba di Cijantung dan langsung diikutsertakan dalam gerakan untuk menutup jalan simpang tiga Cililitan-Kramatjati serta simpang tiga Lanud Halim Lubang Buaya. Pada pukul 06.10 WIB tanggal 2 Oktober 1965 daerah sekitar pangkalan Udara Halim sudah dapat dikuasai. Dalam peristiwa itu terdapat perlawanan kecil dari pasukan Batalion 454 dalam usaha pembersihan Gerakan G-30-S PKI, setelah itu dilanjutkan ke Kampung Lubang Buaya yang sebelumnya pernah dijadikan tempat latihan kemiliteran Pemuda Rakyat dan Gerwani.⁹

Kebijakan Presiden Soekarno mengenai penyelesaian Gerakan 30 September ditanyakan dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora pada 6 Oktober 1965 yang bertempat di Istana Bogor. Penyelesaian peristiwa G-30-S PKI dikeluarkan kebijakan bahwa aspek-aspek politik akan diselesaikan sendiri oleh Presiden, aspek Militer Administratif yang diserahkan kepada Mayor Jenderal Pranoto. Dalam menyelesaikan Aspek Militer Teknis, keamanan dan ketertiban diserahkan kepada Soeharto. Para pimpinan tertinggi Angkatan Darat Indonesia memandang dirinya sendiri sebagai lembaga yang terorganisir paling baik, dan oleh karena itu paling layak dalam memimpin pemerintahan.

⁹ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI ...*, p.487.

Setelah dikeluarkannya pernyataan Presiden Soekarno yang mengutuk G30-S dan semakin tersingkapnya fakta bahwa PKI mendalangi kudeta G30-S. Kemarahan masyarakat pada PKI semakin meningkat antara lain, tercetus dengan dibakarnya gedung kantor pusat PKI di Jalan Kramat Raya. Rumah-rumah tokoh PKI dan kantor-kantor PKI menjadi sasaran kemarahan rakyat. Aksi menuntut agar pimpinan PKI diadili dan demonstrasi menuntut pembubaran PKI yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dan ormas-ormas yang setia pada Pancasila. Gerakan operasi pembersihan sisa-sisa G-30-S terus ditingkatkan antara lain, dengan berhasil ditangkapnya Kolonel A Latief yang setelah dipecat dari Brigade Infantri I atau Kodim V Jaya pada 9 Oktober 1965 dan Letnan Kolonel Untung ditangkap tanggal 11 Oktober tahun 1965 di Tegal dalam perjalanan melarikan diri ke Jawa Tengah.

Partai politik menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia PKI adalah Partai NU yang dipimpin oleh K.H. Ahamd Sjaicha didepan masyarakat pada penutupan Latihan Pendidikan Kader Dewasa III Missi Islam. Ia mengatakan dengan lantang bahwa, pembubaran PKI bagi NU merupakan tuntutan mutlak karena hal tersebut adalah tugas suci. Tuntutan semacam itu oleh Presiden Soekarno dianggap sebagai usaha mendorong kemauan atas tuntutan-tuntutan yang juga disuarakan oleh ormas-ormas lainnya. Soekarno mengatakan, “Saya didesak untuk membubarkan PKI kalau misalnya PNI membakar-bakar keadaan, demikian juga NU, PSII,

PARKINDO Partai Kristen Indonesia”, demikian Presiden pada Sidang Paripurna Kabinet Dwikora 6 November 1965 di Bogor. Lembaga Legislatif Golongan Islam (Politik dan Karya) dalam DPR–GR Pada tanggal 20 Oktober 1965 dengan resmi mengeluarkan tuntutan bubarkan PKI.¹⁰

Setelah Presiden Soekarno dalam waktu lebih dari satu bulan tidak mengeluarkan keputusan apa-apa atau prakata terhadap PKI, pada hari itu juga tanggal 20 Oktober tahun 1965 lalu lintas Ibu Kota macet karena lebih dari 50.000 (baca: lima puluh ribu) massa anggota Ansor dan Ormas-ormas NU lainnya dari seluruh pelosok Ibu Kota, berbaris memenuhi jalanan menuju ke Taman Suropati di jantung Ibu Kota mengadakan rapat umum. Variasi massa membiarkan dukungan pada Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) yang sedang dipersiapkan di Jakarta. Tuntutan utama adalah peninjauan kembali hubungan dengan RRI karena, telah ikut campur tangan dalam masalah penyelesaian G-30-S melalui Radio Peking yang mendiskreditkan nama Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution.¹¹

Pada bulan Oktober 1965, pembunuhan dimulai kekerasan terhadap orang-orang yang terlibat dengan PKI yang terjadi diseluruh daerah, tetapi pembunuhan massal yang terbentuk terjadi di Jawa dan di Bali. Konflik di

¹⁰ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2* (Bandung: PT Gerapindo Media Peratama 2012), p.455.

¹¹ Soegiarso Soerejo, *G30S/PKI dan Apa Peran Bung Karno Siapa Menabur Angin Akan Menunai Badai* (Jakarta: PT. Rola Sinar Perkasa, 1988), p.259.

Jawa Timur antara PKI dan NU telah dimulai pada tahun 1963 yang berubah menjadi pembunuhan massal secara menyeluruh yang dimulai dari minggu kedua bulan Oktober pada tahun 1965. Pada pertengahan bulan Oktober, Soeharto mengirim satuan-satuan prajurit penyerang yang terpercaya ke Jawa Tengah, dan memerintahkan para pasukan yang kurang setia untuk keluar dari Jawa Tengah. Para tentara lebih memilih untuk memenuhi perintah dari Soeharto dari pada melawan prajurit penyerang massal anti PKI. Daerah Bali tampak terdapat keterlibatan Islam dan tuan tanah PNI yang berkasta tinggi memimpin dalam mendorong pembasmian anggota PKI. Puncak pimpinan nasional PKI ditemukan dan dibunuh seperti tertembaknya Njoto pada 16 November tahun 1965 dan Aidit pada tanggal 12 November tahun 1965.

Pada pertemuan 09-11 November 1965 di Jakarta Muhammadiyah mengumumkan bahwa pembasmian Gestapu/PKI sama dengan perang pisabilillah dan kelompok Islam lainnya mendukung pandangan ini. Apapun yang mungkin dimaksud oleh para pemimpin Islam dengan perang suci, pengumuman ini tampaknya untuk menjustifikasi pembunuhan terhadap para komunis sebagai tugas agama dan tiket masuk surga bagi setiap muslim yang kehilangan nyawanya dalam kekerasan itu. Masyarakat Indonesia yang mencurigai fanatisme laten Islam merasa kecurigaan mereka kini terbukti. Oleh karena politik periode 1950-1965 telah semakin

bersesuaian dengan kesetiaan aliran di Jawa, begitu juga banyak pembunuhan terjadi menurut perbedaan aliran. Tentara mendorong dan mendukung orang-orang fanatik dari pihak santri masyarakat Jawa menemukan sasaran PKI diantara saudara-saudara mereka yang abangan. Pemisah antara santri dan abangan ditingkat desa semakin melebar karena terjadinya pertumpahan darah akibat mendukung PKI di Jawa. Banyak orang yang ditangkap sebagian “PNI” juga dibunuh, perseteruan lama diselesaikan dalam konflik politik. Pada waktu itu para tuan tanah dengan mudah menyingkirkan para penghuni liar dengan membunuh mereka.¹²

Pembunuhan berakhir pada bulan-bulan pertama 1966, meninggalkan korban kematian yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Sebagian besar ahli memperkirakan setidaknya setengah juta orang tewas tapi tidak ada satu orangpun yang benar-benar tahu karena tidak ada seorangpun yang menghitungnya. Dalam sejarahnya, Indonesia belum pernah menyaksikan pembunuhan massal yang merenggut korban yang begitu besar. Pembunuhan ini meninggalkan bekas yang begitu dalam dan tidak terlupakan bagi banyak rakyat Indonesia. Sebagian merasa bangga bisa membantu membasmi PKI. Namun, sebagian lainnya merasa bahwa pembunuhan massal ini merupakan peristiwa yang paling memilukan dan tidak bisa dimaafkan, sebuah tindakan kegilaan kolektif. Banyak orang yang ditahan, diinterogasi (sering dibawah

¹² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), p.595.

siksaan), dan ditahan tanpa pemeriksaan pengadilan. Jumlah orang yang diperlakukan seperti itu tidak diketahui pasti. Mungkin, Satu dekade setelah kejadian yang mengerikan pada tahun 1965-1966, sebanyak 100.000 orang yang masih dipenjara tanpa pemeriksaan dan pengadilan. Soekarno disusahkan dengan pembunuhan besar-besaran itu dan keruntuhan revolusi usang. Pada bulan November 1965, ia dengan sedih menghimbau kaum muslim untuk setidaknya menguburkan yang tewas. Pada bulan desember, dia mengubah simpati keadaannya karena memuji peranan PKI dalam Revolusi. Para pendukung PKI yang lolos dari kematian atau penahanan kini bersembunyi atau berusaha menyembunyikan masa lalu mereka. Tentara sedang menuju kekuasaan yang tidak terlindungi, meskipun kekuatan politik Islam masih menipu diri mereka sendiri bahwa mereka akan ikut masuk dalam kekuasaan.¹³

Angkatan 66 merupakan gerakan mahasiswa yang terjadi pada peristiwa antara Januari–Maret tiga bulan pertama di tahun 1966 merupakan yang menentukan baik dari segi politik maupun dari sudut kebangkitanya generasi muda dibawah pimpinan KAMI. Peristiwa-peristiwa 1966 mempunyai tiga aspek yaitu pertama, memberi nilai penting pada peranan angkatan 66 dalam perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Kedua, membentuk satu bingkai dimana angkatan 66 di uji dan diakui.

¹³ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008...*, p.596.

Ketiga, berfungsi sebagai satu referensi pokok dalam arti bahwa gagasan-gagasan, aksi-aksi dan tingkah laku yang muncul pada tahun 1966 akan dijadikan model yang patut ditiru disamping sekaligus menampilkan gagasan orisinal yang mesti diketengahkan bila ada jiwa 45 maka ada pula semangat 66.¹⁴

Soekarno berusaha memegang panggung pusat dan Pada Januari 1966, dia berpidato di radio, menyerukan semua rakyat untuk mengikutinya, sementara Soebandrio menyerahkan pembentukan Barisan Soekarno. Soeharto mengimbangi seruan Soebandrio dengan berikrar bahwa dia tetap setia pada Soekarno dan meminta pada semua pendukung setia untuk mendukung tentara. Walaupun Soeharto mungkin lebih suka melihat Soekarno berfungsi sebagai tokoh yang memberi legitimasi bagi tentara, jelas sudah membawa Presiden itu harus segera turunkan. Pada Februari 1966, Sukarno melakukan usaha terakhirnya untuk menyelamatkan demokrasi terpimpin. Pada 21 Februari, Ia merombak kabinetnya dan memberhentikan Nasution sebagai Menteri Pertahanan serta menghapus jabatan staf angkatan bersenjata. Omar Dhani dan Subandrio adalah dua orang yang dicari tentara dan dipertahankan sebagai menteri. Sukarno menunjuk Letkol Imam Sjafei sebagai Menteri Negara Urusan Keuangan. Perekonomian Indonesia masih berjalan tidak Stabil, indeks biaya bulan

¹⁴ Francios Riallon, *Politik dan Idiologi Mahasiswa Indonesia* (Jakarta; Cv. Taruna Grafika 1985). PP. 15-16

Desember 1965 Januari 1966 meningkat menjadi 50%. Pada 5 Maret 1966, Soeharto mengajukan kepada Sukarno daftar menteri yang harus diberhentikan, pengajuan tersebut ditolak oleh Sukarno.

Disebutkan bahwa adalah Penguasa Pelaksanaan Resimen Angkatan Darat (Pepelrad) di daerah I Mada Mandia diamankan dan dibawa ke Surabaya. Sukarno ditahan selama setahun disebuah kantor tentara dengan menghuni sebuah rumah mantan seorang duta asing. Ada suatu alasan mengapa mantan ketua Partindo Bali dengan Soekarno dan ditahan karena dituduh terlibat PKI. Statemen yang dikeluarkan untuk mengganyangkan tuduha kepada Ketua Partindo yaitu ketidakaannya di Bali pada waktu itu, dan tidak menandatangani pernyataan bersama diantara partai-partai non-Komunis pada tanggal 17 Oktober 1965 untuk mengganyang dan membekukan PKI di Bali. Mengenai hubungan pusat dan daerah pada waktu itu dikatakan cukup baik. Itulah sebabnya ketika semua gerakan dihentikan, maka semuanya dapat mematuhi. Dengan demikian sistem pemerintahan yang tersentralisasi ini berjalan dengan baik. Sehingga semua gerakan seluruh Indonesia itu dapat mematuhinya. Pada saat itu tidak adanya *follow up* dari pusat karena semua setia pada pusat, terutama kepada Soekarno sebagai pimpinan tertinggi.¹⁵

¹⁵ Taufik Abdullah, *et al., eds. Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), pp.385-386.

Sementara itu pemuda-pemuda anti PKI dilatih sampai dua atau tiga hari oleh pasukan RPKDA yang dipimpin oleh Sarwo Edhi. Hal ini dilakukan sejak kehadiran elit tentara yang ada di Bali pada tanggal 12 Desember 1965. Pasukan itu dilepaskan untuk menggerakkan masyarakat dibawah gerakan Komite Aksi penggayangan yang diikuti oleh Ansor yang merupakan sebuah organisasi pemuda Nahdatul Ulama (NU) dan dalam waktu singkat telah diberi latihan oleh RPKAD. Pada saat itu Soekarno tidak memberikan intruksi apapun mengenai apa tindakan selanjutnya sehingga Sarwo Edhi melakukan gerakan penumpasan dan dianggap sebagai tindakan yang membantai anggota PKI dan ormas-ormasnya di Bali. Aksi-aksi ini terjadi di Denpasar dengan RPKAD-nya yang dikenal dalam pasukan “Galak Hitam”. Pasukan ini dibentuk oleh Ansor untuk membantai mereka yang berindikasi PKI.¹⁶

Di Jakarta telah diketahui terjadinya pembunuhan tujuh Jenderal, sedangkan Bali masyarakat mendengarkan bahwa akan ada kudeta Dewan Jenderal. Menurut informasi dari informasi, Bagus Sugiarto yang mengadakan penelusuran di Lapangan tidak terjadi apa-apa di masyarakat dan tidak ada persiapan dari masyarakat. Hal-hal yang strategis justru terjadi setelah pembunuhan tujuh Jenderal di Jakarta, Antara pihak yang bertikai mempersiapkan diri dan rasa saling curigapun berkembang dengan cepat. Isu

¹⁶ Taufik Abdullah, *et al.*, eds. *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional...*, pp.386-387.

mengenai kikis habis PKI semakin gencar dan bangga jika dapat membunuh lawan-lawannya. Ketika pasukan RPKAD datang ke Bali pembunuhan makin memarak. Anggota RPKAD yang datang ke Bali berpangkat mayor, Letnan Kolonel dan dokter. Pada waktu itu polisi tidak terlalu tampak, karena dicurigai bahwa para polisi itu bisa ditembak, padahal disebutkan bahwa polisi waktu itu dapat menegakkan hukum secara benar. Diantara tentara RPKAD adalah etnis Jawa dan bukan berasal dari etnis Bali. Sesudah itu tentara etnis Bali masuk. Tentara-tentara dari etnis Bali kebanyakan ditugaskan di Bima dan Sumbawa Besar, karena ada anggapan kalau bekas tentara orang Bali dapat menguasai keadaan. Pada waktu itu, yang menjadi Panglima adalah Saefuddin yang berasal dari Jember dan beberapa tentara berasal dari Madura. Sementara masyarakat yang tinggal di kota Denpasar menjadi kekuatan dan tidak berani keluar malam hari sejak di berlakukannya jam malam (jam 23:00-04:00) pada tanggal 3 November 1965. Puncak dari G30 itu dimulai dengan adanya pembunuhan yang diawali dengan kegiatan di Bali di antara tanggal 3-10 November 1965 seperti penahanan terhadap pengurus PKI dan ormasnya disebuah gedung dekat Rumah Sakit Umum pusat, di Denpasar. Gudang itu dapat menampung sekitar 600 orang namun pada waktu itu ada sekitar 1800 orang tahanan. Semua perwira yang ditangkap dalam penjara harus dibasmi pada waktu itu. Terdapat dua truk mengangkut pasukan dan mengangkut senjata yang dikatakan oleh Heru

Sugiyono sebagai pengawal komandan kompi bahwa penanganan tentara harus melalui prosedur hukum untuk memperoleh pembuktian keterlibatannya. Sekelompok misalnya mantan komandan Dodik VIII Kediri Tabanan, ditangkap, ditahan dan diadili oleh Mahkamah.¹⁷

Pada tahun 1962 dan tahun 1966 adalah era ketika orang dapat dengan mudah melampiaskan dendam karena pembunuhan tidak terkordinasi, bersifat spontanitas, dan mendorong perasaan sentimen. Mereka yang mempunyai strategi untuk menyerang lebih dahulu daripada diserang seperti dalam situasi perang. Singkatnya apabila ada orang yang dicurigai maka dibunuh. Pada saat itu ada yang dinamakan komando anti G-30-S. Siapa saja yang dilaporkan ke komando ini mereka akan dihilangkan atau dibunuh. Memang *banjar* dilibatkan, karena ketua-ketua kordinasi kesatuan aksi penggayangan atau KOKAP-nya adalah *kelian banjar*. Gambaran situasi ini misalnya dapat dilihat di dunia pendidikan yang mulai dimasuki oleh persoalan politik praktis, yaitu bagaimana seorang kepala sekolah cenderung membiarkan suasana tidak tertib dan bersikap seolah-olah tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Pada siang hari maskarakat yang terindikasi PKI dikejar-kejar masa yang dibantu oleh para tentara. Para anti PKI mengejar orang-orang yang terindikasi terlibat, sementara anggota dan pengurus

¹⁷ Marwati Djoned Poesponegoro, *et al.*, eds. *Sejarah Nasional Indonesia VI ...*, p.487

banjar tidak berani melindungi mereka, karena yang dicari adalah perorangan. Pada malam hari merekapun ditangkap diserahkan ke *banjar-banjar*. Sebagai wadah yang dapat jatuh untuk membunuh hampir setiap desa dan *banjar* dibali sebagian *jatah* pembunuhan seperti itu. dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses pembunuhan berlangsung tanpa adanya kontrol yang jelas sebelum kehadiran anggota RPKAD. Di setiap *banjar* terdapat empat sampai lima orang yang mati dibantai tanpa proses hukum. Pembunuhan tersebut hanya berdasarkan atas nama masa bergerak. pada malam hari mereka dibunuh setelah mereka selesai berkumpul dan sambil menyanyikan lagu “Genjer-genjer”. Saat itu tidak tampak aparat yang berusaha melindungi. Mereka menyebutkan bahwa tidak hanya mereka yang dibunuh, akan tetapi anak cucu mereka juga menanggungnya. Mereka dituduh sebagai pendukung “barisan Soekarno” yang berusaha menghidupkan PKI. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti kelompok mana yang membunuh. Dugaan yang terdiri dari kelompok *tameng* yang bertugas sebagai satuan tugasnya (satgas) PNI sebagai kordinir yang membunuh dan diikuti oleh aparat militer dan polisi yang melindunginya.¹⁸

Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jendral Soeharto, menteri/Panglima Angkatan Darat, yang pada pokoknya berisi perintah kepada letnan Jendral Soeharto atas

¹⁸ Taufik Abdullah, *et al.*, eds. *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional....*, p. 392.

nama Presiden/Pangti Abri/Pimpinan Besar Revolusi mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintah. Pemberian surat perintah tersebut merupakan pemberian kepercayaan dan sekaligus memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengatasi keadaan yang waktu itu tidak stabil. Keluarnya surat perintah tersebut disambut dengan semangat yang menggelora oleh rakyat, dan karena ampuhnya surat perintah tersebut maka masyarakat menamakannya dengan kata singkat “SUPERSEMAR” (Surat Perintah Sebelas Maret). Berlandaskan pada SUPERSEMAR tersebut, pengembannya Soeharto, telah mengambil langkah-langkah yang penting dan memberi arah baru bagi perjalanan hidup bangsa dan negara.¹⁹

Pada 22 Maret 1965 Soeharto dengan berdasarkan SUPERSEMAR memnubarkan PKI beserta ormas-ormas dan pendukung-pendukungnya. rakyat secara spontan melakukan aksi demonstrasi mendukung keputusan yang telah dilaksanakan pengemban SUPERSEMAR saat itu menjadi pawai kemenangan, itulah awal berdirinya awal Orde Baru. Pada tanggal 14 Maret 1965 mahasiswa kembali kuliah. Keputusan pembubaran dan pelarangan PKI itu diambil oleh pengemban SUPERSEMAR berdasarkan pertimbangan bahwa PKI telah nyata-nyata melakukan perbuatan kekejaman dan

¹⁹ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI ...*, p.487.

kejahatan. Bukan itu saja, tetapi telah dua kali melakukan penghianatan terhadap negara dan rakyat Indonesia yang sedang berjuang. Seluruh rakyat Indonesia menjunjung tinggi landasan falsafah dan Ideologi Pancasila waktu itu serentak menunjuk bubarkan PKI.²⁰

Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul *Api Sejarah 2* menyebutkan bahwa puncak keberhasilan perjuangan KAMI dan KAPPI dalam mendukung perjuangan ABRI yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusup, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud menjadikan Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret. Soeharto atas nama Presiden pada tanggal 12 Maret 1966, Sabtu menetapkan pembubaran dan pelarangan PKI dan ajaran Idiologi Komunis.²¹

Pembubaran PKI disambut dengan lega dan gembira oleh rakyat. Tetapi dalam Kabinet masih duduk menteri-menteri yang terlibat G30S/PKI. Para pemuda, mahasiswa dan pelajar melancarkan aksi-aksi terhadap beberapa orang menteri, baik di rumah maupun di kantornya. Demikianlah dalam pengumuman Soeharto mengenai penahanan menteri-menteri disebutkan bahwa “ABRI terpaksa melakukan tindakan pengamanan, dengan yang dimaksud agar supaya menteri-menteri yang dimaksud justru jangan sampai menjadi korban sasaran kemarahan rakyat”.²²

²⁰ Sudharmono, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973 Jilid III...*, p.93.

²¹ Ahmad Mansur Suryanegara, *API SEJARAH 2* (Bandung: PT Gerapindo Media Peratama 2012). .p. 459

²² Sudharmono, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973 Jilid III...*, p.95.

Pada tanggal 18 Maret Soekarno mengumumkan penahan 15 (lima belas) orang Menteri yang bersimpatik pada PKI. Mereka itu adalah: Waperdam I Dr. Soebandrio, Waperdam III Dr. Chairul Saleh. Menteri Tenaga Listrik Ir. Setiadi Reksoprodjo, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Sumardjo, Menteri Negara yang diperbentukan pada Presidium Kabinet Oei Tjoe Tat. Menteri Irigasi dan Menteri pembangunan masyarakat Desa Ir Surachman, Menteri Bank Sentral dan Gubernur Bang Negara Yusuf Muda dalam. Menteri pertambangan Armumanto, menteri perhubungan Sumanto Martopradopo, Menteri Kehakiman Astawaninat, SH. Menteri penerangan Mayjen TNI Akhmadi, menteri diperbantukan pada Presidem dalam Urusan Keamanan dalam Letkol Imam Syafe'I Menteri atau Sekjen Front Nasional J. Tumakaka, Menteri Transmigrasi dan Koprasi Drs. M. Achmad dan Menteri dalam Negri atau Gubernur DKI Jakarta Mayjen TNI Dr. sumarno Sastroatmodjo.²³

Tindakan pengamanan terhadap kelima belas menteri tersebut, pada 18 Maret tahun 1966, dengan pengemban Surat Perintah Sebelas Maret menunjuk beberapa menteri *ad interim* guna mengisi pos-pos dan lowongan karena diamankannya beberapa menteri. Di samping langkah-langkah pengemban Surat Perintah Sebelas Maret menginstrusikan atau menyerukan

²³ R. Soemarno Dipodisastro, *Menggayang PKI Lewat Tritura 10 januari 1966* (Jakarta: , 2003), pp. 49-50.

kepada semua Perguruan Tinggi dan pada awal bulan Maret telah ditutup, untuk memulai kembali kuliah-kuliah seperti biasa.²⁴

B. Kondisi Perekonomian Mulai Stabil

Setelah terjadinya peristiwa kudeta 1965, masa depan politik Indonesia masih belum jelas. Pada akhirnya, Soeharto membangun apa yang dikenal dengan “Orde Baru” Indonesia, untuk membedakannya dengan “Orde Lama” dari masa pemerintahan Soekarno. Orde Baru terbentuk dengan dukungan yang sangat besar dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu. Dalam kehidupan intelektual, terjadi pembicaraan tentang suatu angkatan pimpinan muda baru dan suatu zaman baru, suatu “Angkatan 66”. Namun, Elite Orde Baru yang terdiri atas faksi militer yang didukung oleh sekelompok kecil sipil telah menghasilkan banyak sekutu. Periode tahun 1965-1975 mengundang beragam pendapat dari pengamat dalam dan luar negeri dari pihak sayap kanan memuji pemerintah Soeharto Karena mampu membasmi PKI dan mengadopsi kebijakan yang pro-Barat dan Sebaliknya dari sayap kiri mencibirnya karena kedua kebijakan tersebut. Di antara para pengamat yang kurang memihak, terdapat banyak pengamat di samping memuji prestasi pemerintah Soeharto

²⁴ Sudharmono, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973 Jilid III...*, p.94.

dalam menyeimbangkan ekonomi, juga menjadi catatan buruk bagi hak asasi manusia dan korupsi pemerintah tersebut.²⁵

Orde Baru memang mampu membangun ekonomi nasional, tetapi tidak mampu meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan. Orde Baru mengembangkan gaya pemerintahan yang paternalistic, namun juga menindas. Orde Baru berusaha mencari keterlibatan rakyat untuk mendapatkan legitimasi, tetapi hanya lewat cara-cara yang dikendalikan dengan cermat. Sebagian besar pembangunan ekonomi nasional bergantung pada perusahaan asing dan hanya terjadi pertumbuhan kecil pada industri pribumi. Pandangan Snouck Hurgronje mengenai Islam tetap penting, karena Orde Baru juga menghormati Islam sebagai praktik agama pribadi tetapi tidak memberinya peluang untuk menjadi kekuatan politik, seperti ketika periode awal aliansi antara aktivis Islam pada tentara yang pro-Soeharto berhasil membasmi PKI dan menyingkirkan Soekarno.²⁶

Orde Baru harus menghadapi masalah-masalah sosial yang lebih besar dari pada yang dihadapi para reformasi di masa politik etis. Hal ini terjadi sebagian karena Belanda gagal menyelesaikan masalah-masalah itu beberapa dekade sebelumnya, dan sebagian lagi karena berlalunya waktu atau berputarnya waktu dalam pergolakan yang terjadi sejak penklukan Jepang membuat masalah tersebut kian kompleks. Belanda gagal memenuhi

²⁵ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008...*, p.587.

²⁶ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008...*, p.588.

kesejahteraan bangsa pada tahun 1930 berpenduduk 60,7 juta. Karena kelalaian selama beberapa dekade lalu dan mendesaknya kebutuhan untuk terlebih dahulu untuk mengendalikan ekonomi bangsa setelah tahun 1965. Pemerintahan Orde Baru pada awalnya tidak mampu berkontribusi banyak dalam memenuhi kesejahteraan rakyat, pada sensus tahun 1971 telah mencapai 119,2 juta jiwa dan 147,3 juta pada tahun 1980.²⁷

C. Lahirnya Orde Baru

Peralihan Orde Lama ke Orde Baru, bukanlah masa yang mudah. Sejak hari pertama setelah G30S/PKI, penduluanam politik dengan cepat bergerak kearah yang berlawanan. Namun tidak berarti tanpa perlawanan. Sementara rakyat menghendaki perubahan itu berlangsung cepat. Pemimpin Orde Baru yang diharapkan yaitu pak Harto. Menolak untuk mengambil alih kepemimpinan Nasional dari bung Karno secara inkonstitusional. Bahkan mengesankan enggan dan bahkan hormat kepada pendahulunya. Rakyat yang terlanjur eforia, menghadapi kenyataan yang sangat dilematis yang dapat digambarkan sebagai adanya”dualisme” kepemimpinan nasioanal diperlukan waktu dua tahun untuk mengakhiri dualisme. Konsolidasi Orde Baru, sudah tentu tidak lepas dari kondisi yang ditinggalkan Orde Lama. Tidak seluruh apa yang terjadi dilakukan di era Orde Lama dibuang, bahkan secara

²⁷ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p. 267.

idiologis justru lebih dipertegas sebagai landasan Orde Baru yaitu melaksanakan Pancasila/UUD 1945 secara murni dan konsekuen Mayor Jenderal Soekarno, sebagai pengembal SP 11 Maret (Supersemar), bahkan mencantumkan “Panca Azimat Revolusi” ajaran Bung Karno dalam konsideran pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966.²⁸

Dalam strategi membangun negara pasca kepemimpinan Soekarno, Orde Baru memperkenalkan trilogi pembangunan. Diantaranya :

1. Terciptanya stabilitas politik yang mantap yang memungkinkan kelangsungan jalannya pembangunan.
2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk memperbesar pemasukan devisa nasional.
3. Pemerataan hasil pembangunan untuk memenuhi prinsip keadilan sosial.²⁹

Ketiga trilogi pembangunan ini yang bertujuan sebagai stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan adalah konsep dasar Orde Baru dalam menjalankan roda pemerintahan. Soeharto yang berperan sebagai penggerak Orde Baru mencoba berbagai hal .

Setelah adanya nota politik yang disampaikan oleh KAMI kepada DPR-GR pada tanggal 2 Mei tahun 1966, sebagai mana telah penulis

²⁸ Sulastomo, *hari-hari yang Panjang Transisi Orde lama ke Orde Baru* (Jakarta: Kompas, 2008), p. 191.

²⁹ Sulastomo, *hari-hari yang Panjang Transisi Orde lama ke Orde Baru...* p.192.

sebutkan pada BAB Sebelumnya, dengan nada yang sama Front Pancasila menandatangani pernyataan kebulatan tekad. Dalam menggapi suasana konpilik, pimpinan Mayjen Seharto Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 5 Mei 1966 mengeluarkan pernyataan yang isinya menegaskan posisi ABRI dalam suasana konpilik. Pimpinan ABRI menyatakan:

Bentuklah Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah memahamidengan seksama perkembangan keadaan yang mengejawantahkan suara hati nurani rakyat, dengan khidmat. Menanggapi dengan pernyataan, antara lain, sebagai berikut.

1. Angkatan Bersenjata adalah pengaman, pengawal, Revolusi Indonesia dengan ketiga kerangka tujuannya yang hendak dicapai berdasarkan Pancasila.
2. Angkatan Bersenjata adalah pengaman pimpinan Revolusi Indonesia dan pengaman Kewibawaan Presiden Soekarno beserta ajaran-ajarannya dengan ikhtikad baik anak kandung revolusi berani dan papar dalam meberikan laporan dan pertimbangan kepada Pimpinan Presiden

3. Angkatan Bersenjata hendak menempatkan hakikat kedudukan presiden yang sebenarnya menurut kemurenian asal dan sendi pelaksanaan UUD 1945.³⁰

Pernyataan itu ditandatangani oleh Jenderal Soeharto, Jenderal A.H. Nasution, Laksamana Muda Laut Mulyadi, komdor Udara Rusmin Nuryadin, dan Komisaris Jenderal Polisi Soetjipto Joedodiharjo. Bersamaan dengan pernyataan pimpinan ABRI, DPR-GR menyampaikan sumbangan pikiran untuk dijadikan acara pokok dalam Sidang Umum IV MPRS. Saran-saran untuk perbaikan politik dalam negeri juga diajukan oleh Universitas Indonesia dalam kerja sama dengan KAMI dan KASI (Kesatuan Aksi Serjana Indonesia) pada simposium *Kebangkitan Semangat '66 Menjelajah Tracee Baru* yang diselenggarakan pada tanggal 2-9 Mei 1966. Khusus mengenai bidang politik dalam negeri dengan tema”: Indonesia Negara Hukum”, antara lain diingatkan bahwa pada waktu yang lampau banyak sekali terjadi penyimpangan dari asas-asas serta norma-norma yang berlaku dalam suatu negara hukum. Peraturan hukum dan pelaksanaannya tidak mencerminkan jiwa Pancasila. Dalam bidang ketata negaraan ditunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan bahwa ada pejabat yang harus bertanggung jawab kepada pejabat yang lain, tetapi pejabat yang

³⁰ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI ...*, p.465.

bersangkutan justeru pengangkatannya tergantung dari pejabat yang tersebut pertama, seperti tercantum dalam Penetapan Pereside (Penpers) No: tahun 1959 tentang PMRS. Lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Agung yang seharusnya melakukan “Kekeusaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”, Ketuanya diangkat sebagai Menteri Negara yang menyebabkan pengintegrasian mahkamah agung dalam tubuh Kabinet sebagai Lembaga Eksekutif.³¹

Mengenai saran-saran yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengembalikan kewibawaan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum diusulkan pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, penghentian penspres-penspres baru dan peninjauan kembali semua penspres yang telah dikeluarkan. Diusulkan pula agar diadakan jaminan yang cukup terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia dalam menciptakan dan menegakan hukum. Pada bulan Mei 1966, pemerintah disibukan oleh Sidang Umum 4 MPRS yang akan diselenggarakan pada bulan Juni-Juli 1966. Suasana politik makin memanas, para pendukung Peresiden Seokarno melakukan konsolidasi yang melibatkan kesatuan-kesatuan Angkatan.³²

³¹ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p. 276

³² Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p. 552

Bersenjat terutama di Jawa Timur. Untuk membelia Bung Karno dan menentang Sidang Umum MPRS, mereka mengadakan pawai dengan tema “ Bung Karno Jaya” dan “ Pejah Gesang Nderek Bung Karno hidup-mati berama Bung Karno”. Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soerharto. Kemudian MPRS bersidang dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966 menghasilkan 24 ketetapan MPRS dan satu keputusan No 5/MPRS/1966.³³

Menyadari fungsinya sebagai lembaga yang menentukan Garis Besar Haluan Negara MPRS pada waktu yang bersamaan menegeluarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera. Kabinet Ampera dibentuk untuk memenuhi dan melaksanakan Tri Tuntutan Rakyat di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. Tugas membentuk Kabinet ini diserahkan pada Letjen Soeharto sebagai Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Tugas pokok yang dibebankan kepada Kabinet ini ialah menciptakan kestabilan politik dan ekonomi dengan programnya antara lain memperbaiki kehidupan rakyat, terutama dibidang sandang dan pangan, serta melakukan pemilihan umum sesuai Ketetapan MPRS No. XI.

³³ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p. 387

Guna menunjang program kerja Kabinet Ampera, bertempat di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung, mulai tanggal 25-31 Agustus 1996 diadakan Seminar Angkatan Darat II. Seminar ini bertujuan menyumbangkan pikiran kepada Kabinet Ampera dengan merumuskan konsep strategi dan operasi Kabinet Ampera. Dibidang politik dan konsitutional dirumuskan dasar-dasar Demokrasi Pancasila seperti dimaksud dalam UUD 45, yang berarti menegakan kembali asas-asas negara hukum, dimana kepastian hukum diserahkan oleh seluruh warga negara serta penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Lembaga-lembaga serta tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan-ikatan pribadi dan lebih dipertimbangkan. Sosialisme Indonesia dirumuskan sebagai yang adil dan makmur, sedangkan mengenai jangkauan revolusi dimaksudkan untuk mendorong Indonesia kearah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan tuntutan abad ke 20. Kabinet Ampera diresmikan pada tanggal 28 Juli 1996, setelah Letjen Soeharto mengadakan konsultasi dengan pimpinan MPRS dan DPR-GR maupun dengan organisasi politik. Jangka waktu kerja Kabinet Ampera adalah dua tahun. Tugas pokok dan programnya dikenal dengan Dwi Dharma Catur Karya berorientasi kepada tugas-tugas penyelesaian proses revolus.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945, pimpinan adalah presidenn Soeharto yang memipin kabinet. Pelaksanaan pimpinan

pemerintahan sehari-hari dilakukan oleh presidium kabinet yang dipimpin oleh seorang Ketua Presidium Letjen Soeharto. Kebijakan umum pemerintah dilaksanakan oleh menteri-menteri yang berjumlah 24 orang. Masing-masing menteri memimpin sebuah departemen. Dalam melaksanakan *Dwi Dharma* (tugasnya) dan *Catur Karya* (programnya), Kabinet Ampera berpegang kepada hasil-hasil Sidang Umum III MPRS tahun 1996. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur desentralisasi teritorial, kepada pemerintah daerah diletakan tanggung jawab otonomi riil yang seluas-luasnya. Kepada pemerintah daerah juga diberikan menjalankan politik *dekonsentrasi* sebagai *komplemen* yang vital. Dengan menjalankan politik demikian, diharapkan dapat mendewasakan daerah menuju swadaya dan swasembada dalam berbagai bidang. Unsur-unsur yang pada mulanya ada dalam kewenangan pusat kemudian dialihkan menjadi tugas dan kewenangan daerah (desentralisasi) tanpa mengurangi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat. Penyerahan tugas dan wewenang kepada daerah diimbangi dengan keuangan yang dibutuhkan. Semerntara itu, masalah kepastian keormasan dan berkenaan kekaryaan, MPRS menghasilkan Ketetapan MPRS No. XII 1996 yang mengatur mengenai pemerintahan, Keormasan, dan kekaryaan. Menteri yang dibahas dalam masalah ini ialah Penetapan Presiden No. 7 / 1959, Peraturan Presiden No. 13 / 1960, dan Keputusan

Presiden No. 2 / 1959 yang ditinjau kembali. Pengaturan ketetapan ini merupakan penerapan asas demokrasi berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Bidang lain yang mendapatkan perhatian MPRS ialah masalah pembinaan kesatuan bangsa. Melalui resolusi MPRS No. III / Res / MPRS / 1966 ditetapkan dalam pasal-pasal nya mengenai penerapan sistem pendidikan pancasila dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Mengintensifkan pendidikan agama sebagai unsur mutlak untuk *National* dan *character building* (bangunan)³⁴ disemua sekolah dan lembaga pendidikan dengan memberikan kesempatan yang seimbang.
2. Melarang usaha penumbuhan dan pengembangan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Pancasila, antara lain Marxisme-Leninisme (komunisme)³⁵

Karena bahasa dianggap sebagai alat pemersatu yang ampuh. Pasal 2 dari resolusi MPRS ini menekankan kepada pemerintah agar penggunaan bahasa Indonesia ditinggikan. Demikian pula menegenai budaya-budaya daerah pada pasal 3 digariskan untuk menyuburkan pertumbuhannya. Usaha integrasi melalui asimilasi warga negara untuk keturunan asing dilaksanakan dengan mengajukan larangan perangkapan kewarga negaraan. Dalam pelaksanaannya untuk menghapuskan segala hambatan-hambatan yang

³⁴ <http://www.arti.definisi.com>

³⁵ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p.

menyebabkan terjadinya hubungan tidak harmonis dengan warga Negara asli. Ketentuan ini tercantum dalam Resolusi MPRS yang sama, yaitu pasal 4.³⁶

Pasal 7 resolusi MPRS memberikan petunjuk untuk memperkuat kesatuan bangsa, dengan menyadarkan perlunya pencerminan sikap Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Pertentangan politik dalam negeri berangsur-angsur menjadi reda setelah Peresiden Soekarno pada tanggal 22 Febuari tahun 1967 menyerahkan kekuasaan pemerintahan Negara kepada Jenderal Soeharto. MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa pada tanggal 2-7 Maret tahun 1967 dengan mengangkat Jenderal Soeharto selaku pejabat Peresiden. Pendekatan-pendekatan dengan organisasi politik dan organisasi massa oleh pejabat peresiden tetap berlangsung guna mendapatkan masukan mengenai kehendak mereka³⁷.

Masih dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin berlakunya hukum dan demokrasi di Indonesia, beberapa produk MPRS sesuma Demokrasi Terpimpin ditinjau kembali, seperti ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 yang telah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, disesuaikan dengan tuntutan serta perkembangan politik, ekonomi, dan Sosial Orde Baru. Untuk itu,

³⁶ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p. 554

³⁷ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p. 555.

berdasarkan ketetapan Politik MPRS No. X /MPRS/1966 Pasal I, MPRS berpungsi sebagai MPR yang dimaksud Dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga ini yang berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.³⁸

Setelah bermusyawarah dari tanggal 7- 12 Maret 1967 dikeluarkan ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/ 1967 yang meninjau kembali ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manofesto Politik Republik Indonesia yang menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara. Prodok MPRS masa lalu lainnya yang tinjau kembali ialah tentang gelar atau peringatan tentang Pimpinan Besar Revolusi. Berdasarkan ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966, predikat Pimpinan Besar Revolusi yang diberikan kepada Dr. Ir Soekarno tidak membawa wewenang hukum sehingga dianggap sebagai gelar biasa. Selanjutnya berdasarkan MPRS No. XXXV/MPRS/1967, mencabut ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966. Selain gelar, karya Bong Karno yang dikenal sebagai “Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi”, sebagaimana yang dicantumkan oleh ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966, dinyatakan sebagai asset intelektual nasional mempunyai kedudukan yang sama dengan karya-karya pemimpin Indonesia lainnya.

³⁸ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al., eds. Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p. 556

Ketetapan yang kemudian diambil alih oleh MPRS ialah mencabut ketetapan PMRS yang mengatur tentang penelitian ajaran Pimpinan Besar Revolusi Bung Karno. Memasuki terakhirnya masa transisi, pemerintah menghadapi berbagai masalah nasional. Mengingat pemilihan umum sesuai dengan keputusan MPRS harus diselenggarakan dalam tahun 1968, sedangkan undang-undang yang mengatur belum ada, Pejabat Presiden di depan DPR MPRS-GR dan tujuan pemilihan umum ialah menciptakan stabilisasi politik untuk membangun wujud demokrasi yang sehat. Pemilihan umum paling cepat dapat diselenggarakan dalam jangka waktu 1 tahun sesudah diundangkannya berbagai undang-undang yang diperlukan. Tujuan pemilihan umum adalah untuk menyegarkan DPR dan MPRS-GR, mendekatkan pendudukannya kepada masyarakat yang diwakilinya. Penyegaran lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta lembaga-lembaga eksekutif lainnya merupakan kebutuhan yang mendesak agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan penyegaran lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional mendapat dukungan luas dari semua lapisan masyarakat.³⁹ Ada tiga masalah nasional selama tahun terakhir masa transisi (yang berlangsung dari

³⁹ Marwati Djoned Poesponegoro, *et al.*, eds. *Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p. 557.

tanggal 1 Januari sampai tanggal 26 Maret 1968) yang diperhatiakn oleh peresiden Orde Baru, yaitu adalah salah satunya sebagai berikut:

1. Memperkuat pelaksanaan sistem konstitusional, menegakan hukum, dan menumbuhkan kehidupan demokratis yang sehat sebagai syarat untuk mewujudkan stabilisasi politik.,
2. Melaksanakan pembanguan lima tahun yang pertama sebagai usaha untuk member isi kepada kemerdekaan.,
3. Tetap waspada dan sekaligus memberantas sisa-sisa kekuatan Laten PKI.

Masalah nasioanl lainnya yang ditanggulangi ialah peningkatan mutu pegawai serta pemberantasan korupsi. Usaha ini ditempuh dengan cara alokasi dan meningkatkan mutu MPRS. Untuk itu, diselenggarakan pendidikan khusus sehingga mereka dapat meningkatkan mutu pekerjaannya. Pemerintah tidak melakukan pengeluaran pegawai secara dokrastime karena hal ini dapat menimbulkan masalah sosial yang baru. Selanjutnya guna menanggulangi masalah pemberantasan korupsi, pemerintah membentuk *Tim Pemberantasan Korupsi* (TPK). Pada mulanya tim ini bekerja dengan pola secara sederhana, yaitu mengadakan penyelidikan terhadap para pejabat yang menurut masyarkat melakukan korupsi. Terhadap penyelewengan yang menurut hukum tidak dapat ditindak, pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan adminstratif. Langkah yang

sangat penting ialah mengembalikan Kepolisian Republik Indonesia pada fungsi semula, yaitu sebagai alat keterlibatan masyarakat dan penegak hukum. Dengan dikembalikannya fungsi Kepolisian ini, kriminalitas berangsur-angsur berkurang.⁴⁰

Tujuan dari Orde Baru adalah untuk menghentikan langkah-langkah yang tidak bersifat ideologi Pancasila dan UUD 1945. Atau mengembalikan Pancasila sebagai dasar panutan Rakyat Indonesia. PKI termasuk sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi PKI tidak mematuhi perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Presiden, oleh sebab itu PKI dimusnahkan dalam Negara republik Indonesia. Jika masih ada seseorang yang berideologi PKI selalu diawasi oleh masyarakat. Kehatiran masyarakat.

Pada tanggal 7 Februari 1967 Jenderal Soeharto menerima surat rahasia dari Presiden Soekarno dengan perantaraan Hardi, S.H. Surat tersebut dilampiri sebuah konsep (draf) surat penugasan mengenai pimpinan pemerintah sehari-hari kepada pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada tanggal 8 Februari 1967, oleh Jenderal Soeharto, konsep tersebut dibahas dan dibicarakan bersama keempat Panglima Angkatan Bersenjata. Jenderal Soeharto dan para panglima berkesimpulan bahwa konsep surat tersebut tidak dapat diterima karena penugasan semacam itu tidak akan membantu

⁴⁰ Marwati.Djoned Poesponegoro, *et al.*, eds. *Sejarah Nasional Indonesia VI...*, p.558.

menyelesaikan konflik politik yang ada. Dua hari kemudian, tanggal 10 Februari 1967, Jenderal Soeharto menghadap Presiden Soekarno dan membicarakan masalah surat penugasan khusus itu, serta melaporkan pendirian Panglima Angkatan. Presiden kemudian menanyakan kemungkinan yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya para Panglima Angkatan Bersenjata menemui Presiden di Bogor. Di hadapan Presiden, Jenderal Soeharto mengajukan konsep yang mungkin digunakan untuk mempermudah penyelesaian situasi konflik. Presiden meminta waktu untuk mempelajarinya. Konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto itu berisi tentang Pernyataan presiden berhalangan atau Presiden menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berdasarkan ketetapan MPRS No. XV / MPRS / 1966.

Sesuai dengan janji Presiden pada tanggal 12 Februari 1967, Jenderal Soeharto beserta dengan para Panglima Angkatan Bersenjata mengadakan pertemuan lagi. Dalam pertemuan ini Presiden Soekarno menyatakan tidak dapat menerima konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto. Presiden mengusulkan supaya diadakan perubahan bentuk, disamping itu juga tidak menyetujui pernyataan yang isinya berhalangan. Presiden mengusulkan agar esok harinya diadakan pertemuan kembali.

Pada tanggal 13 Februari 1967, para Panglima berkumpul kembali untuk membicarakan konsep yang telah disusun sebelum diajukan kepada

Presiden. Pada pukul 11.00 para Panglima mengutus Jenderal Panggabean dan Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo untuk menghadap Presiden. Dalam pertemuan ini tidak terdapat kesepakatan pendapat karena Presiden masih menuntut perubahan-perubahan yang tidak mungkin dapat dipenuhi. Beberapa waktu kemudian, dengan perantaraan Major Jenderal Surjo Sumpeno, Ajudan Presiden, Presiden Soekarno menyatakan setuju konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto, tetapi beliau meminta jaminan dari Jenderal Soeharto. Selanjutnya memerintahkan agar Jenderal Soeharto bersama para Panglima Angkatan berkumpul kembali pada hari minggu tanggal 19 Februari 1967 di Bogor. Selama itu para Panglima Angkatan Bersenjata mengadakan serangkaian pertemuan membahas soal-soal yang akan dibicarakan dengan Presiden.

Tanggal 19 Februari kembali diadakan pertemuan di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu Presiden tetap menolak untuk menandatangani konsep yang diajukan Jenderal Soeharto. Sore harinya Pangliam Angkatan Laut (Pangal) Laksamana Mulyadi dipanggil oleh Presiden. Pangal Mulyadi datang menghadap dengan membawa kondep yang telah dipersiapkan. Presiden menyetujui dengan perubahan-perubahan kecil pada pasal 3 ditambah dengan kata-kata menjaga dan menegakkan revolusi.

Pada tanggal 20 Februari Pangal Mulyadi dan Pangak Soetjipto dipanggil menghadap Presiden. Kemudian konsep itu ditanda tangani pada

hari itu juga. Peresiden meminta agar diumumkan pada hari kamis, tanggal 23 Februari, 1967. Pada hari kamis sore Jenderal Soeharto memanggil semua Menteri ke kantor presidium Kabinet, Merdeka Barat 15. Semua Menteri tidak ada yang tahu maksud pemanggilan Jenderal Soeharto, kecuali para Pangliam Angkatan.

Surat ketetapan Majelis permusyawaratan republic Indonesia tentang pembubaran PKI yaitu sebagai berikut:

KETETAPAN
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
No:XXV/MPRS/1966

Tentang

Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA.
REPUBLIK INDONESIA, *)

Menimbang:

- a. Bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti- hakekatnya bertentangan dengan pancasila;
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan;
- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.⁴¹

⁴¹ Jenderal Dr. H. Nasution, *Menegakan Keadilan Dan Kebenaran* (Jakarta:Seruling Masa, 1967) , p. 152